

**PERAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM  
MENANGGULANGI DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN BANGUNAN DI KOTA  
PEKANBARU PROVINSI RIAU**

Muhammad Baariq Yazid

NPP. 29.0277

*Asdaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau*

*Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik*

Email: muhammadbaariq09@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP)** "ROLE OF THE FIRE AND RESERVATION DEPARTMENT IN MANAGING AND PREVENTING BUILDING FIRE IN PEKANBARU CITY, RIAU PROVINCE" which discusses the role of the Pekanbaru City Fire and Rescue Service in dealing with and preventing building fires in Pekanbaru City, supporting factors and the obstacles faced by the Pekanbaru City Fire and Rescue Service in tackling and preventing in Pekanbaru City, as well as the efforts made by fire tackling. **Purpose:** This study was conducted to determine how the role of the fire and rescue service in tackling and preventing the city of Pekanbaru in tackling and preventing building fires in the city of Pekanbaru, Riau province. **Methods:** In carrying out this research, the researcher used a descriptive qualitative method with an inductive approach. Researchers use role theory according to Soerjono Soekanto. Researchers collect data through interviews, documentation and observation. Researchers processed data by collecting data, reducing data, presenting data and conclusions. **Results/Findings:** The Role of the Fire and Rescue Service in Overcoming and Preventing Building Fires in Pekanbaru City, Riau Province, it can be concluded that the role of DPKP is quite good but not optimal. The role of Pekanbaru City DPKP as a supporter for decision making has been going well, judging from the response time rate and the applicable Standard Operating Procedures. The role as a supporter for decision making is carried out by increasing the competence of employees assessed from the Education and training (coaching) of the Task Force with the target that each member of the DPKP task force is able to cope with building fires that occur. **Conclusion:** Pekanbaru City DPKP has been recognized by the community through community satisfaction and seen through community response to building fires in Pekanbaru City DPKP services. Therefore, DPKP will always try to improve the capacity and quality for dealing with building fires in Pekanbaru City. Coordination and communication at the DPKP Pekanbaru City can be seen from the preparedness or responsiveness of the DPKP task force which so far is considered to be quite satisfactory. The Pekanbaru City DPKP task force in dealing with building fires is in accordance with the predetermined response time, except for the long distance, which is still above the response time due to the long distance and the limitations of the task force and supporting tools for dealing with building fires.

Keywords: Role, Fire Service, fire

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP)** “PERAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MENANGGULANGI DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN BANGUNAN DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU” dimana membahas mengenai peran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi dan pencegahan kebakaran bangunan di Kota Pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi dan pencegahan di Kota Pekanbaru, serta upaya yang dilakukan oleh dalam menanggulangi kebakaran . **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menanggulangi dan pencegahan kota pekanbaru dalam menanggulangi dan pencegahan kebakaran bangunan di kota pekanbaru provinsi Riau. **Metode:** Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan, peneliti memakai metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Peneliti mengolah data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan **Hasil/Temuan:** Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi Dan Pencegahan Kebakaran Bangunan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau maka dapat disimpulkan peran yang dilakukan DPKP cukup baik namun belum maksimal. Peran DPKP Kota Pekanbaru sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan telah berjalan dengan baik dilihat dari response time rate dan sudah berjalannya Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Peran sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan peningkatan kompetensi pegawai dinilai dari Pendidikan dan pelatihan (pembinaan) Satgas dengan sasaran setiap anggota satgas DPKP mampu menanggulangi adanya kebakaran bangunan yang terjadi. **Kesimpulan:** DPKP Kota Pekanbaru telah diakui masyarakat melalui kepuasan masyarakat dan dilihat melalui tanggap masyarakat akan adanya kebakaran bangunan dalam pelayanan DPKP Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, DPKP akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas untuk penanggulangan kebakaran bangunan di Kota Pekanbaru. Koordinasi dan komunikasi di DPKP Kota Pekanbaru dilihat dari kesiapsiagaan atau responsivitas para satgas DPKP yang sejauh ini dinilai sudah cukup memuaskan. Para satgas DPKP Kota Pekanbaru dalam menanggulangi adanya kebakaran bangunan sudah sesuai dengan *respond time* yang telah ditentukan kecuali untuk jarak yang jauh masi diatas dari *respond time* dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan satgas beserta alat-alat pendukung untuk menanggulangi kebakaran bangunan.

Kata kunci: Peran, Dinas Pemadam Kebakaran, Kebakaran

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Pekanbaru menjadi satu dari sekian kota terbesar Indonesia juga menjadi ibu kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru menjadi daerah pusat perekonomian besar dari sekian kota yang berada di pulau Sumatera juga Kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini didorong oleh jenis perkonomian yang dijalankan pada bidang perindustrian minyak bumi dan perdagangan. geografis Kota pekanbaru berada di titik wilayah yang menguntungkan karena dilalui jalur lintas Timur Sumatera yang menghubungkan dengan kota besar di pulau Sumatera dan wilayah administratif. Kota Pekanbaru pada bagian utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan bagian Barat dan Selatan dengan Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru memiliki Iklim tropis dan suhu udara yang relatif tinggi dengan suhu paling tinggi 34,1 °C sampai 35,6 °C dan suhu terendah 20,2 °C sampai 23,0 °C, dengan ketinggian 5-50 meter di atas permukaan laut. Keadaan perekonomian Kota Pekanbaru yang berkembang memicu terjadi urbanisasi dan migrasi yang tinggi Pemerintah dalam menanggulangi bencana baik alam maupun non-alam, ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tentang cita-cita bangsa. Dalam pelaksanaannya pemerintah dituntut bekerja secara efektif dan efisien dalam menangani bencana di Indonesia. Diharapkan penanggulangan memberikan dampak baik dalam mengurangi penyebab dan resiko dari bencana yang dihadapi.

Kebakaran Pemukiman terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang terjadi di pemukiman. Kebakaran yang sering terjadi di pemukiman penduduk disebabkan oleh peralatan listrik yang menggunakan barang tidak sesuai standar dan juga pemasangan yang tidak sempurna, juga

penggunaan alat listrik yang tidak sesuai. Lalu Penggunaan alat masak serta kurangnya pemahaman dalam menggunakan kompor gas atau kompor listrik serta kelalaian sewaktu memasak. Kebakaran Pemukiman juga disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri seperti menghidupkan api di dalam ruangan yang rawan api dan penggunaan listrik yang terus menerus yang melampaui batas penggunaannya.

Kebakaran Pemukiman berdampak buruk terhadap kehidupan di pemukiman yang terkena Kebakaran. Hal ini berdampak kepada jalannya perekonomian di kota yang dapat terhambat apabila yang terbakar merupakan gedung yang memiliki pengaruh ekonomi di daerah tersebut, juga tercemarnya lingkungan sekitar diakibatkan kebakaran dan berlanjut kepada kesehatan masyarakat yang akan terganggu diakibatkan polusi serta asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Korban jiwa tak luput dari Kebakaran Pemukiman yang mengakibatkan korban tewas, luka-luka dan gangguan kondisi psikologis diakibatkan Kebakaran yang dialami.

Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas tak jarang mendapati hambatan dalam melakukan penanganan Kebakaran yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kekurangan armada dalam melaksanakan pemadaman kebakaran di Kota Pekanbaru serta representasi pos Pemadam Kebakaran yang belum representatif, kurangnya THL dalam melaksanakan operasional pemadam kebakaran, belum adanya RISPK (rencana induk potensi system kebakaran ), belum adanya relawan dalam membantu DAMKAR dan koordinasi antar DAMKAR , POLISI dan PLN. Hal ini membuat damkar menjadi kurang optimal berdasarkan data TA 2021.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kebakaran pemukiman di Kota Pekanbaru dari tahun ketahun mengalami peningkatan angka. Hampir disetiap tahun kebakaran di Kota Pekanbaru selalu terjadi menyebabkan korban jiwa, kerugian harta dan benda serta gangguan moril yang dialami. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2018 jumlah kebakaran di Kota Pekanbaru terjadi sebanyak 114 kali dan kecamatan yang paling banyak mengalami kebakran pada saat itu adalah Kecamatan Marpoyan Damai .

Dari penjelasan diatas penulis tertarik membahas tentang dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota pekanbaru dikarenakan permasalahan kebakaran baik itu alam maupun non-alam seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya, Oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul “Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi Dan Pencegahan Kebakaran Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan Muhammad Riduansyah, Endang Erawan, Annisa Wahyuni Arsyad yaitu “PERAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENSOSIALISASIKAN BAHAYA DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA”, penelitin yang dilakukan oleh Yunita Adilla, Sidharta berjudul ” FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN KEBAKARAN BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT DI KELURAHAN MELAYU KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH”, dan penelitian yang dilakukan Aziz Darmanto dkk berjudul “PERAN DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENANGGULANGI

KEBAKARAN DI PERMUKIMAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN)”yang dimana dari 3 penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan dari penelitian yang saya lakukan sebab penelitian saya melihat pemberdayaan fakir miskin melalui program penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan program pemerintah sementara ketiga penelitain ini berangkat dari program yang dibangun oleh masyarakat oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang.

Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya :

1. Peran Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Mensosialisasikan Bahaya dan Pencegahan Kebakaran di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yang berfokus pada penelitian tentang penelitian untuk membatasi penelitian, sehingga akan memfasilitasi pemrosesan data dengan pembatasan penelitian, dan pengumpulan data akan disimpulkan menggunakan data yang dikumpulkan nanti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dinas pemadam kebakaran untuk risiko dan pencegahan kebakaran untuk masyarakat luas juga menggunakan media. Media yang digunakan dalam bentuk media dicetak melalui media cetak (surat kabar, papan iklan dan brosur), media elektronik (televisi) dan situs web media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peran departemen kebakaran untuk risiko dan pencegahan kebakaran masyarakat.

2. Faktor penyebab kerentanan kebakaran berdasarkan persepsi masyarakat di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data yang ada dan melakukan survei terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan

untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kerawanan kebakaran berdasarkan kesadaran masyarakat di kampung Melayu di wilayah Banjarmasin kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen instalasi listrik memenuhi standar yang tinggi dan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap instalasi listrik yang aman di Kelurahan-Melayu masih rendah.

3. Peran Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dki Jakarta Dalam Menanggulangi Kebakaran Di Permukiman (Studi Kasus Di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana melakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi lapangan dan pengumpulan data yang terkait. Dalam penelitian ini menggunakan teori peran. Penelitian ini dilakukan pada tingkat wilayah kelurahan serta melakukan penelitian terhadap kasus kebakaran yang telah terjadi di kelurahan pejaringan.

#### **1.5. Tujuan.**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui peran dan analisis peran dari Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
2. Mengetahui faktor penghambat dan analisis penghambat peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau
3. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam mengatasi hambatan

## II. METODE

Bapak dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Peran oleh Soejono (2014:210) di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi Setelah data



dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran Dinas Pemadam kebakaran Dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi dan Pencegahan Kebakaran Bangunan yang terjadi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau**

1. Pemenuhan Anggaran Dalam Melaksanakan Dan Memenuhi kebutuhan Sarana Dan Prasarana

Perlengkapan kerja bagi pasukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan suatu hal yang penting, apalagi hal tersebut bertujuan untuk keberhasilan dari strategi kebijakan yang ada. Kondisi tersebut juga sangat penting apalagi kasus kebakaran bangunan seperti ini dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai pelaksana kebijakan terkait dengan memadamkan api kebakaran bangunan di Kota Pekanbaru.

2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekanbaru

Pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya di dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting di dalam suatu organisasi, karena dibutuhkannya skill dan keterampilan dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran serta harus memiliki kondisi fisik yang sehat dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam menangani kebakaran.

hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi Eka Surya, S.Sos, M.Si pada tanggal 12 Januari 2022:

“Kemampuan satgas dalam menguasai sarana prasarana yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran bangunan sudah bagus, DPKP Kota Pekanbaru rutin melakukan simulasi latihan di lapangan yang dimiliki DPKP Kota Pekanbaru. Semua personel satgas yang dimiliki DPKP Kota Pekanbaru sudah memiliki kompetensinya di bidang masing-masing, mereka sudah dibagi-bagi tugas setiap personil satgas. Pelatihan yang diberikan kepada personel satgas DPKP setidaknya 2 kali dalam setahun, dalam memberikan pelatihan DPKP bekerjasama dengan instansi terkait lainnya misalnya Basarnas. Untuk seleksi penerimaan anggota satgas DPKP yang baru, semua tergantung kebijakan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan”.

Kemampuan satgas DPKP dalam penguasaan penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan kebakaran bangunan sudah bagus, setiap satgas memiliki kompetensi masing-masing sesuai dengan tugas yang sudah diberikan kepada setiap personel. DPKP Kota Pekanbaru rutin melakukan latihan simulasi penanggulangan bencana di lapangan kosong untuk mengasah kompetensi yang dimiliki personel satgas.

### 3. Sumber Daya Manusia DPKP Kota Pekanbaru

hasil wawancara dengan Bapak Rahmadi Eka Surya, S.Sos, M.Si mengenai sumber daya manusia pada tanggal 12 Januari 2022:

“Kemampuan satgas dalam menguasai sarana prasarana yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran bangunan sudah bagus, DPKP Kota Pekanbaru rutin melakukan simulasi latihan di lapangan yang dimiliki DPKP Kota Pekanbaru. Semua personel satgas yang dimiliki DPKP Kota Pekanbaru sudah memiliki kompetensinya di bidang masing-masing, mereka sudah dibagi-bagi tugas setiap personil satgas. Pelatihan yang diberikan kepada personel satgas DPKP setidaknya 2 kali dalam setahun, dalam memberikan pelatihan DPKP bekerjasama dengan instansi terkait lainnya misalnya Basarnas. Untuk seleksi penerimaan anggota satgas DPKP yang baru, semua tergantung kebijakan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan”.

Komposisi pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

### 4. Pelaksanaan Urusan dan Sub-Urusan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memiliki tugas yang terbagi dalam fungsi dan wilayah. Dalam hal ini tugas pemadam kebakaran termasuk dalam tugas umum yang berkaitan dengan tugas pokok sesuai dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas pokok yang diatur dalam tugas umum yang berkaitan dengan tugas pokok.

Salah satu urusan pemerintahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang wajib yaitu menangani bencana kebakaran dan sub urusan yaitu menangani permasalahan atau kendala yang terjadi di masyarakat seperti mengamankan binatang liar yang berada di tengah masyarakat.

Berdasarkan observasi yang telah diamati oleh peneliti, pelaksanaan urusan pemerintahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik dari urusan dan sub-urusan. Seperti kasus kebakaran yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 di Sukaramai yang melibatkan 13 unit MPK untuk memadamkan api yang melahap ruko sukaramai dan pelaksanaan sub-urusan pada tanggal 23 Desember 2021 menyelamatkan kucing dari kebakaran bangunan di Jl.sumatra.

#### 5. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru membuat keputusan pelayan masyarakat terkait penanggulangan kebakaran bangunan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Untuk menciptakan sebuah tujuan maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru membutuhkan pengorganisasian pekerjaan, mulai dari pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab organisasi hingga mengarahkan interaksi pekerjaan. Dalam membuat keputusan tersebut ditemukan hambatan yang dapat menghalangi dalam pencapaian target organisasi. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap menjalankan strategi sebuah organisasi.

Pelaksanaan penanggulangan kebakaran bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standar merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah strategi yang diciptakan dapat dicapai. Itu berarti standar merupakan tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalani strategi nya.

Penyelenggaraan pelayanan yang baik adalah yang mengacu sesuai dengan standar operasional dan prosedur. Kejelasan mengenai standar pelayanan menggambarkan kepastian tentang alur proses penyelenggaraan pelayanan dalam penanggulangan kebakaran bangunan di Kota Pekanbaru yang menjadi acuan bagi DPKP Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya.

#### 6. Pelaksanaan Pelayanan Efektif dan Efisien Kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien diperlukan sarana untuk menyalurkan koordinasi yang dilakukan dan komunikasi yang dikemukakan. Alasan dibutuhkannya koordinasi dan komunikasi dalam sebuah pelaksanaan pelayanan efektif dan efisien kepada masyarakat merupakan sebagai pelengkap agar pelaksanaan pelayanan terkoordinir dengan baik dan meminimalisir adanya miskomunikasi didalam organisasi. Hasil dari koordinasi dan komunikasi yang akan dicapai merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya pelayanan dari sebuah organisasi yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

Hasil yang akan dicapai harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Ketika sebuah organisasi sudah mencapai tujuannya maka dapat dikatakan organisasi tersebut sudah menjalankan pelayanan yang dirancang dengan baik. Sesuai dengan tujuan yaitu meningkatnya responsif penanggulangan dan untuk mengukurnya dengan melihat dari waktu respon penanggulangan (respon time). Sesuai dengan target dan sasaran kinerja respon time tahun 2022 adalah 15 menit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Faisal Hendri, menyebutkan pelaksanaan pelayanan bahwa :

” Untuk tindakan terhadap kebakaran bangunan sudah dapat dikatakan baik sesuai strategi yang dijalankan. Ini dapat dilihat dari respon time (waktu tanggap bencana), namun untuk jangkauan jarak yang terlalu jauh mungkin akan melewati target respon time kami, tetapi DPKP Kota Pekanbaru sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merespon cepat dari laporan masyarakat terhadap kebakaran bangunan. Untuk penanganan dilapangan cepat atau lambat itu tergantung situasi dilapangan. Apabila kebakarannya besar maka akan memakan waktu yang tidak sedikit dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki”.

pada penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan menanggulangi kebakaran bangunan yang terjadi. Melalui hasil dari observasi di lapangan tanggapan masyarakat mengenai kinerja yang telah dilakukan peneliti Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan sejauh ini telah dilakukan dengan baik dan merespon setiap laporan masyarakat dengan tanggap dan cepat

#### 7. Pelayanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 januari 2022 dengan Bapak Wan Zulfan, S.E, M.Si menjelaskan bahwa :

“sejauh ini dari pihak DPKP sendiri hanya bertugas mengeluarkan surat keterangan kebakaran untuk dipergunakan mengurus surat -surat lain bagi korban kebakaran”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak DPKP hanya mengeluarkan surat keterangan kebakaran yang diperuntukan untuk korban yang mengalami kebakaran bangunan dan surat ini digunakan untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk korban kebakaran.

#### 8. Kesiapsiagaan Dan Mitigasi Dalam Menghadapi Kebakaran

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2022 dengan Ibu Irni Dewi Tari, S.STP, M.Si mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi kebakaran menjelaskan kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi kebakaran bahwa:

“Dalam Bidang Kesiapsiagaan ini kami melakukan monitoring hampir setiap hari namun sifat dasar manusia yang tidak pernah merasa puas, masyarakat menganggap kerja yang dilakukan DPKP terkait kebakaran bangunan belum maksimal. Ketika kita melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, masyarakat kurang memberikan respon yang baik dan kurang antusias terhadap sosialisasi yang diberikan, masyarakat menganggap sosialisasi hanya sebatas formalitas dan main-main. Padahal ini sangatlah penting bagi mereka untuk pengetahuan terkait kebakaran bangunan. Ketika kita melakukan tindakan terhadap kebakaran bangunan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hanya menonton saja seolah tidak mengetahui apa-apa, disitulah diharapkan masyarakat ikut memperhatikan sekitar karena kejadian kebakaran bangunan seperti ini adalah urusan bersama.”

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris DPKP Kota Pekanbaru terkait informasi tentang bencana karhutla mengatakan bahwa :

“Kami sudah melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, untuk sosialisasi dilakukan DPKP Kota Pekanbaru 1 kali dalam setahun yang dianggarkan pemerintah Kota Pekanbaru, namun dalam penyebaran informasi DPKP juga memberikan dalam bentuk pamflet (brosur) yang dibagikan kepada masyarakat melalui Kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pada tanggal 16 Januari 2022 mengemukakan bahwa :

“Masalah kebakaran bangunan ini sebenarnya sudah bisa diatasi sama pihak yang berwajib, salah satu penyebab kebakaran ini adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab seperti membuang puntung rokok dengan sengaja, kemudian setelah terjadi kebakaran selanjutnya aparat datang oknum ini berpura-pura tidak mengetahui adanya terjadi kebakaran. Alhamdulillah DPKP bisa memadamkan semua api walaupun agak memakan waktu yang cukup lama terkendala akses masuk kedalam lokasi kejadian”.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menarik garis besar bahwa masyarakat Kota Pekanbaru masih rendah kesadarannya akan kebakaran bangunan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Masih kurangnya kepedulian untuk melapor kepada pihak yang berwenang tepat disaat kejadian kebakaran bangunan terjadi membuat DPKP sedikit terlambat menuju daerah kebakaran. Sudah sering dilakukannya penyuluhan disetiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

### **3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung yang mempengaruhi Peran Penanggulangan Kebakaran Bangunan di DPKP Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti simpulkan bahwa masih ada masyarakat yang kurang peduli dan partisipasinya terhadap penanggulangan kebakaran bangunan, padahal partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangatlah penting karena kasus kebakaran bukan hanya urusan Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan akan tetapi kasus kebakaran bangunan adalah urusan bersama dan pihak-pihak terkait lainnya juga memberikan bantuan berupa personel dan sarana dan prasarana yang memang saat ini DPKP Kota Pekanbaru masih memiliki kekurangan terhadap sarana prasarana.

### **3.3 Upaya yang dilakukan DPKP Kota Pekanbaru dalam penanggulangan Kebakaran Bangunan di Kota Pekanbaru**

1. Mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya kesadaran terhadap kebakaran bangunan dengan cara lebih peduli terhadap arus listrik terutama di rumah seperti mematikan listrik yang tidak digunakan, tidak menggunakan arus listrik dalam jumlah yang banyak dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2. Menambah Pos Pemadam Kebakaran di beberapa titik kecamatan agar petugas pemadam kebakaran bisa standby dan bisa menerima laporan dan menuju ke lokasi kebakaran dengan cepat dan tepat waktu.
3. Berkoordinasi dengan BASARNAS dalam kekurangan sarana prasarana yang dimiliki DPKP.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti penanggulangan kebakaran bangunan sangatlah intens dan serius. Seluruh anggota khususnya bagian petugas pemadam kebakaran sangat kerja keras dalam hal menanggulangi kebakaran bangunan. Mereka bekerja dengan sangat antusias sehingga hasil pekerjaan mereka pun sudah sangat memuaskan.

### **3.4 Diskusi temuan utama penelitian**

Dampak yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru yang rata-rata setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu pemukiman yang semakin padat dan kumuh yang berpengaruh kepada kondisi sosial dan juga keamanan masyarakat terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kebakaran gedung atau pemukiman. Contoh kasus kebakaran yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu Kebakaran gedung Telkomsel yang diakibatkan oleh arus pendek dan kebakaran terjadi di bagian inti di gedung telkomsel yang menyebabkan seluruh gedung kebakaran dan menyebabkan gangguan jaringan telkomsel di pulau Sumatera termasuk Kota Pekanbaru<sup>1</sup>.

Kasus diatas merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pemadam Kebakaran dan

---

<sup>1</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Ada Gangguan Jaringan Di Sumatera, Ini Penjelasan Telkomse," kompas.com, 2020, <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/11/18443987/ada-gangguan-jaringan-di-sumatera- ini-penjelasan-telkomsel>.

Penyelamatan Kota. Dinas ini mengurus wilayah kota dan dibentuk untuk menanggulangi bencana Kebakaran dan juga Penyelamatan di masyarakat. Melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2016 pasal 2 poin D No. 7 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pemadam kebakaran karena itu kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dituntut melaksanakan tugas secara Profesional dan melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Pemerintah dalam menanggulangi bencana baik alam maupun non-alam, ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 tentang cita-cita bangsa. Dalam pelaksanaannya pemerintah dituntut bekerja secara efektif dan efisien dalam menangani bencana di Indonesia. Diharapkan penanggulangan memberikan dampak baik dalam mengurangi penyebab dan resiko dari bencana yang dihadapi Kebakaran Pemukiman terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang terjadi di pemukiman. Kebakaran yang sering terjadi di pemukiman penduduk disebabkan oleh peralatan listrik yang menggunakan barang tidak sesuai standar dan juga pemasangan yang tidak sempurna, juga penggunaan alat listrik yang tidak sesuai. Lalu Penggunaan alat masak serta kurangnya pemahaman dalam menggunakan kompor gas atau kompor listrik serta kelalaian sewaktu memasak. Kebakaran Pemukiman juga disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri seperti menghidupkan api di dalam ruangan yang rawan api dan penggunaan listrik yang terus menerus yang melampaui batas penggunaannya. Kebakaran Pemukiman berdampak buruk terhadap kehidupan di pemukiman yang terkena Kebakaran. Hal ini berdampak kepada jalannya perekonomian di kota yang dapat terhambat apabila yang terbakar merupakan gedung yang memiliki pengaruh ekonomi di daerah tersebut, juga tercemarnya lingkungan sekitar diakibatkan kebakaran dan berlanjut kepada kesehatan masyarakat yang akan terganggu diakibatkan polusi serta asap yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut.

Korban jiwa tak luput dari Kebakaran Pemukiman yang mengakibatkan korban tewas, luka-luka dan gangguan kondisi psikologis diakibatkan Kebakaran yang dialami. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas tak jarang mendapati hambatan dalam melakukan penanganan Kebakaran yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kekurangan armada dalam melaksanakan pemadaman kebakaran di Kota Pekanbaru serta representasi pos Pemadam Kebakaran yang belum representatif, kurangnya THL dalam melaksanakan operasional pemadam kebakaran, belum adanya RISPK (rencana induk potensi system kebakaran ), belum adanya relawan dalam membantu DAMKAR dan koordinasi antar DAMKAR , POLISI dan PLN. Hal ini membuat damkar menjadi kurang optimal berdasarkan data TA 2021. Kebakaran pemukiman di Kota Pekanbaru dari tahun ketahun mengalami peningkatan angka. Hampir disetiap tahun kebakaran di Kota Pekanbaru selalu terjadi menyebabkan korban jiwa, kerugian harta dan benda serta gangguan moril yang dialami. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran pada tahun 2018 jumlah kebakaran di Kota Pekanbaru terjadi sebanyak 114 kali dan kecamatan yang paling banyak mengalami kebakran pada saat itu adalah Kecamatan Marpoyan Damai .

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi Dan Pencegahan Kebakaran Bangunan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau maka dapat disimpulkan peran yang dilakukan DPKP cukup baik namun belum maksimal. Peran DPKP Kota Pekanbaru sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan telah berjalan dengan baik dilihat dari response time rate dan sudah berjalannya Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Peran sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan peningkatan kompetensi pegawai dinilai dari Pendidikan dan pelatihan (pembinaan) Satgas dengan



sasaran setiap anggota satgas DPKP mampu menanggulangi adanya kebakaran bangunan yang terjadi.

DPKP Kota Pekanbaru telah diakui masyarakat melalui kepuasan masyarakat dan dilihat melalui tanggap masyarakat akan adanya kebakaran bangunan dalam pelayanan DPKP Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, DPKP akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas untuk penanggulangan kebakaran bangunan di Kota Pekanbaru. Koordinasi dan komunikasi di DPKP Kota Pekanbaru dilihat dari kesiapsiagaan atau responsivitas para satgas DPKP yang sejauh ini dinilai sudah cukup memuaskan. Para satgas DPKP Kota Pekanbaru dalam menanggulangi adanya kebakaran bangunan sudah sesuai dengan respond time yang telah ditentukan kecuali untuk jarak yang jauh masi diatas dari respond time dikarenakan jarak yang jauh dan keterbatasan satgas beserta alat-alat pendukung untuk menanggulangi kebakaran bangunan.

target masi tergolong belum berjalan dengan baik dikarenakan masi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru seperti banyaknya mobil pemadam yang tidak bisa digunakan, keterbatasan Hydrant dan Water Reservoir, dll. Keterbatasan yang menjadi kekurangan bagi DPKP Kota Pekanbaru ini diharapkan tidak menjadi penghalang bagi DPKP Kota Pekanbaru dalam menjalankan strateginya untuk menanggulangi kasus kebakaran bangunan yang ada di Kota Pekanbaru.

Faktor pendukung dalam penanggulangan bencana kebakaran bangunan oleh DPKP di Kota Pekanbaru yaitu dukungan pemerintah terutama di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, selain itu sinergitas antar instansi yang membantu DPKP seperti TNI, POLRI, dan BASARNAS sangat

mendukung tercapainya penanggulangan kebakaran bangunan dikarenakan sinergitas untuk melengkapi kekurangan-keurangan yang dimiliki DPKP Kota Pekanbaru. Faktor penghambat dalam penanggulangan kebakaran bangunan yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepedulian tentang kebakaran bangunan, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan terhambatnya penanganan kebakaran bangunan. Kemudian ditambah dengan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pembakaran dengan cara lupa mematikan listrik, menggunakan aliran listrik yang berlebihan dan terutama membuat puntung rokok sembarangan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap pentingnya kesadaran terhadap kebakaran bangunan dengan cara lebih peduli terhadap arus listrik terutama di rumah seperti mematikan listrik yang tidak digunakan, tidak menggunakan arus listrik dalam jumlah yang banyak dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, dengan menambah Pos Pemadam Kebakaran di beberapa titik kecamatan agar petugas pemadam kebakaran bisa standby dan bisa menerima laporan dan menuju ke lokasi kebakaran dengan cepat dan tepat waktu, serta berkoordinasi dengan BASARNAS dalam kekurangan sarana prasarana yang dimiliki DPKP.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga memiliki keterbatasan dalam lingkup bahasan yang hanya berfokus dalam konteks peran dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menanggulangi dan pencegahan kebakaran bangunan di kota pekanbaru provinsi riau

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dan pembahasan serupa berkaitan upaya pencegahan kebakaran bangunan di kota Pekanbaru provinsi Riau

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pemadam Kebakara telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-buku

- Astra International. 2001. "Green Company Pedoman Pengelolaan Lingkungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,".
- BNPB. 2018. *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1,.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
- Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Denzin, K Norman, and Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar,.
- Depnaker. 1987. *Bahan Training Keselamatan Kerja Penanggulangan Kebakaran*. Jakarta: Binawas Depnaker,.
- Komariah, Aan, and Djam'an Satori. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,.
- National Fire Protection Association. *Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems*. New York: National Fire Protection Association., 2000.
- Rasyid, M. R.. 1997. *Makna Pemerintahan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone,.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta,.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2018.

*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suma'mur, PK. 2009. *Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta: CV Haji Masagung,.

Toha, Miftah. 2002 *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

## **B. Website**

Akhmasyah, Doddy. 2009. "Pipa Hydrant." Dodyakhmadsyah.com,. [www.dodyakhmadsyah.com](http://www.dodyakhmadsyah.com)

Geoportal Data Bencana Indonesia. "Kejadian Bencana per Jenis Bencana." [gis.bnpb.go.id](http://gis.bnpb.go.id), 2021. <https://gis.bnpb.go.id/>.

KBBI. "Penanggulangan." [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), 2021. <https://kbbi.web.id/tanggulang>.

Www.pekanbaru.go.id. "Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan." [pekanbaru.go.id](http://pekanbaru.go.id), 2021. <https://www.pekanbaru.go.id/p/opd/dinas-pemadam-kebakaran-dan-penyelamatan>

## **C. Peraturan**

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3. *Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran*. Jakarta, 1992.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9. "Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru." In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2008.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12. *Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah*, 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114. *Standar Teknik Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota*, 2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36. "Bangunan Ge." In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532*, 2005.

Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 98. “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.” In *Berita Daerah Kota Pekanbaru*, 2016.

